

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat

Najwa Laili¹ Wirawan Suhaedi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2}

Email: najwalaili0811@gmail.com¹ wirawan.suhaedi@unram.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 119 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *proportionate stratified random sampling*. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 99 responden yang berasal dari 33 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan sehingga membutuhkan banyak pembangunan desa agar menjadi maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa, pemerintah memberikan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disalurkan kepada pemerintah desa melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah akan menambah sumber pemasukan bagi desa. Namun, besarnya dana yang disalurkan juga dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut bersumber dari minimnya pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga memicu terjadinya penyalahgunaan, salah satunya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), terhitung sejak tahun 2015-2021, terjadi sebanyak 592 kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan 729 orang tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Objek korupsi ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, mark up (penggelembungan) anggaran dan suap. Bahkan korupsi dana desa ini masuk ke dalam tiga terbanyak kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan (Kompas, 2023).

Kasus penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, dimana ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Pertama adalah kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh kepala desa

Banyu Urip, dimana beberapa kegiatan alokasi dana desa tidak sesuai dengan draf dan tidak ada bentuk pertanggungjawabannya. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 722 juta lebih. Kasus kedua terjadi di Desa Kuripan, yaitu mantan kepala desa dan mantan sekretaris tim Pelaksana Kegiatan Desa, melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016 yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 677 juta lebih. Selanjutnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa Terong Tawah berkaitan dengan anggaran dana desa tahun 2018. Akibat kasus ini, kerugian negara mencapai hingga Rp 480 juta (SuaraNTB, 2021). Adanya kasus penyalahgunaan dana desa tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam mengelola keuangannya. Di samping itu, peran masyarakat juga sangat diperlukan. Pemerintah desa harus memberikan ruang terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mendorong masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam forum diskusi desa, serta membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat turut serta dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga penyelewengan dana desa dapat diminimalisir (Suhaedi et al., 2022).

Berdasarkan Agency Theory, menyatakan bahwa terdapat hubungan atau kontrak antara agent dan principal (Scott, 2015). Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa bertindak sebagai agent yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dana desa dan harus memberikan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi serta kepada masyarakat selaku principal. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pertama adalah kompetensi aparatur desa. Seorang aparatur harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal. Aparatur desa merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karo et al. (2022) dan Masruhin & Kaukab (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) dan Adnyana (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal yang diterapkan secara baik memiliki dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa selalu dievaluasi dan dilakukan perbaikan terhadap pengendalian internal pemerintah desa tersebut (Rezkiyanti 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) dan Sapartiningsih et al. (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Alfian et al. (2022) dan Yuda (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi informasi membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen desa secara keseluruhan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah desa dalam mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Termasuk dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut, dan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan

laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pilianti & Rasmini (2021) dan Mantako et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Laia et al. (2022) dan Pahlawan et al. (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

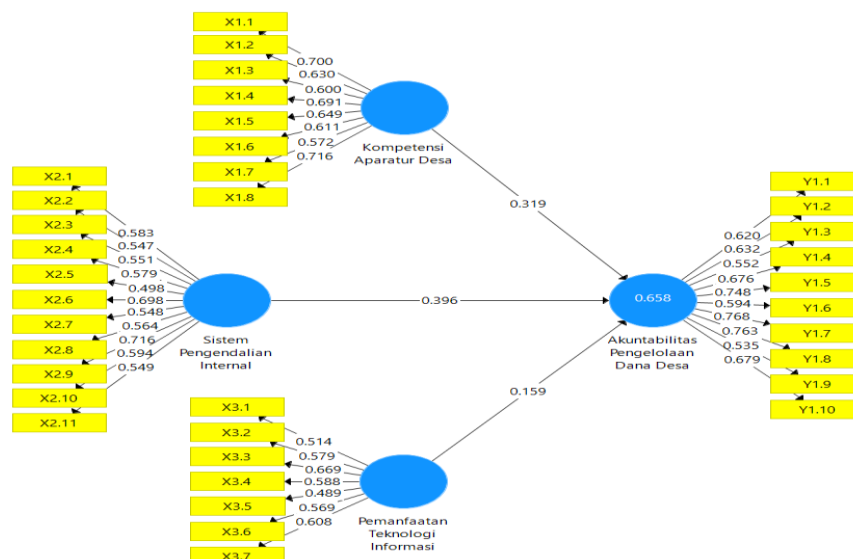
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 119 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *proportionate stratified random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 33 desa. Setiap desa diambil 3 responden di antaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 99 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan pengukuran skala *likert* 1-5. Skor 5 yang artinya sangat setuju (SS), skor 4 yang artinya setuju (S), skor 3 yang artinya kurang setuju (KS), skor 2 yang artinya tidak setuju (TS) dan skor 1 yang artinya sangat tidak setuju (STS). Alat analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

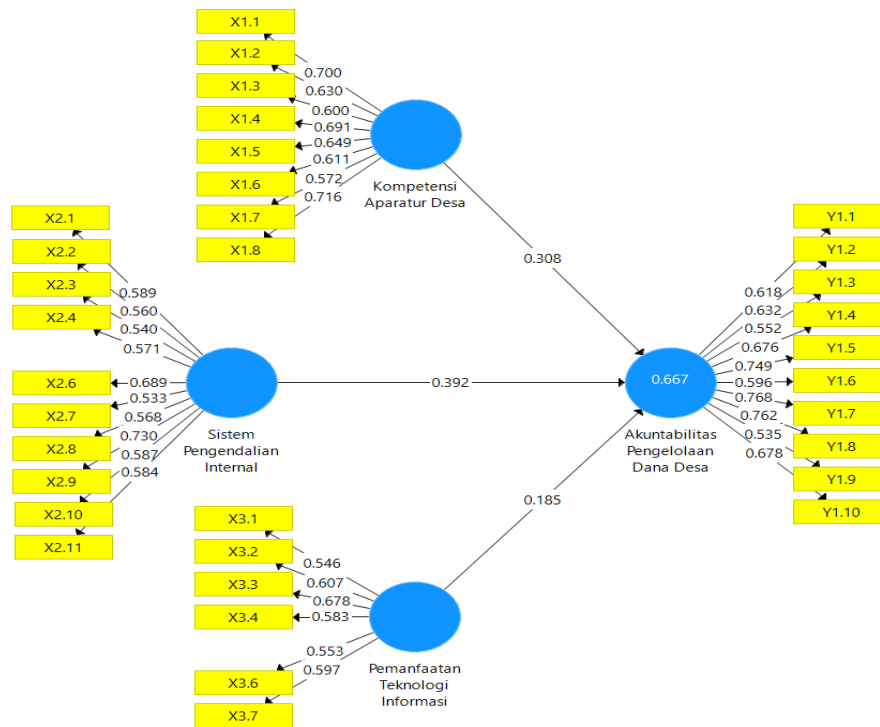
Uji Validitas

Convergent Validity

Uji validitas konvergen (*convergent validity*) dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Semakin tinggi nilai *loading factor*, maka semakin penting peran *loading* dalam menginterpretasi matrik faktor. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk mengukur validitas konvergen adalah *outer loading* $>0,7$. Namun menurut Chin (1998), nilai *loading factor* 0,5 – 0,6 masih dianggap cukup (Ghozali & Latan, 2015).



Gambar 1. Model Pengukuran Sebelum Dieliminasi



Gambar 2. Model Pengukuran Setelah Dieliminasi

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel, maka nilai *composite reliability* harus $>0,7$.

Tabel 1. *Composite Reliability*

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,852
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,847
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,766
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,885

Sumber: Olah Data *Smart PLS* (2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa konstruk dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Hipotesis

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, telah dilakukan pengolahan data melalui PLS berdasarkan prosedur pengolahan data, sehingga diperoleh hasil pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Konstruk	<i>T Statistics</i> ($ O/STDEV $)	<i>P Values</i>	<i>T Table</i>	Hipotesis	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	3,173	0,002	1,66	H1	Diterima
Sistem Pengendalian Internal → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	3,496	0,001	1,66	H2	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	2,245	0,025	1,66	H3	Diterima

Sumber: Olah Data *Smart PLS* (2023)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat pada tabel 2 hasil *P Values* (0,002) < 0,05 dan *T Statistic* (3,173) > *T Table* (1,66). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat pada tabel 2 hasil *P Values* (0,001) < 0,05 dan *T Statistic* (3,496) > *T Table* (1,66). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat pada tabel 2 hasil *P Values* (0,025) < 0,05 dan *T Statistic* (2,245) > *T Table* (1,66). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan nilai signifikansi atau *P Values* (0,002) < 0,05, sementara nilai *T Statistic* (3,173) > *T Table* (1,66). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, diterima. Tingginya kompetensi aparatur desa dapat berasal dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur desa, didukung oleh pengetahuan (*knowledge*) yang baik, keterampilan (*skill*) yang mumpuni, sikap (*attitude*) dan pengalaman yang dimilikinya terkait pengelolaan dana desa, sehingga semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Hal ini sesuai dengan *Agency Theory*, dimana pemerintah desa sebagai *agent*, yaitu pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana desa, harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukannya terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, aparatur desa harus meningkatkan kompetensinya agar dapat mengelola dana desa dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Jika aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Kaukab (2019), Sari & Padnyawati (2021), Ilhami & Widhiastuti (2022), Atiningsih & Ningtyas (2019), Deviyanti & Wati (2022), Rezkiyanti (2019), Sapartiningsih et al. (2018), Pilianti & Rasmini (2021), Budiana et al. (2019) dan Mantako et al. (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan nilai signifikansi atau *P Values* (0,001) < 0,05, sementara nilai *T Statistic* (3,496) > *T Table* (1,66). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, diterima. Dalam pemerintah desa, perlu adanya sistem pengendalian internal untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk dalam hal pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah desa wajib melakukan

pengendalian atas kegiatan yang dilakukan, karena sistem pengendalian internal dapat menjamin kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif, melakukan penilaian risiko atas setiap kegiatan yang dilakukan, melaksanakan kegiatan pengendalian yang sesuai, menerapkan informasi dan komunikasi yang efektif serta pemantauan atas sistem pengendalian internal.

Hal ini sesuai dengan *Agency Theory*, dimana pihak *agent* yaitu pemerintah desa diberikan amanah untuk melakukan segala kegiatan pemerintahan termasuk mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkannya. Sebagai *agent*, pemerintah desa juga berperan sebagai pengambil keputusan atas segala bentuk kegiatan pengelolaan dana desa. Namun, masih banyak ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyimpangan tersebut. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal, maka dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah desa, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019), Adnyana (2021), Syafaruddin et al. (2019), Rezkiyanti (2019), Sapartiningsih et al. (2018), Pilianti & Rasmini (2021), Budiana et al., (2019), Ardianti et al. (2022), Kusrawan (2019) dan Zulaikah et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan nilai signifikansi atau *P Values* $(0,025) < 0,05$, sementara nilai *T Statistic* $(2,245) > T Table (1,66)$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, diterima. Teknologi informasi digunakan sebagai sarana pendukung yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam mengelola, menyimpan dan menyampaikan informasi. Termasuk dalam pengelolaan dana desa, teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data atau dokumen secara menyeluruh, seperti membuat laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengelolaan data menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah desa diwujudkan dengan adanya *software/hardware* pendukung yang digunakan dalam menunjang pekerjaan, didukung oleh tersedianya jaringan internet yang dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga segala proses pengelolaan dana desa secara terkomputerisasi dapat dilakukan dengan optimal.

Hal ini sesuai dengan *Agency Theory*, di mana pemerintah desa sebagai *agent* yang diberikan amanah untuk mengelola dana desa, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih andal dan relevan. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi, penyampaian informasi terkait pengelolaan dana desa dapat lebih mudah, sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Panjaitan et al. (2022), Syafaruddin et al. (2019), Deviyanti & Wati (2022), Rezkiyanti (2019), Pilianti & Rasmini (2021), Mantako et al. (2020), Ardianti et al. (2022), Yuda (2023), Kusrawan (2019) dan Zulaikah et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkompeten aparatur desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula dengan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2010, 297–309.
- Alfian, Adelia, R., & Murti, G. T. (2022). The Effect of Village Official Competency, Community Participation, Information and Technology Utilization and Internal Control System on Village Fund Management Accountability (Empirical Study of Bangkarangan District, Tapin, South Kalimantan, Indonesia). *Industrial Engineering and Operations Management*, 3(2), 2402–2409.
- Ardianti, E., Zulhelmy, Alhempri, R. R., & Shaddiq, S. (2022). The Effect of the Use of Information Technology, Internal Control Systems, and Human Resource Competence on the Accountability of Village Fund Management in Bungaraya District. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 06(12), 97–104.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1),
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(1), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April, 36–48. <https://balipost.com>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2019). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198.

- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Karo, V. V. B., Simanjuntak, A., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 119–134.
- Kompas. (2023, March 15). *Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*.
- Kusrawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 271–284.
- Laia, V. R., Simanjuntak, A., & Sipayung, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 83–90.
- Mantako, S. A. A., Said, D., & Nurleni. (2020). The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village Fund Management Officers, and Utilization of Information Technology on Accountability of Village. *AFEBI Accounting Review*, 4(02), 94.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Siahaan, S. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Motung, Pardumuan M. *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Pilianti, N. K. D., & Rasmini, N. K. (2021). The Effect of Community Participation, Competency of Employees, Utilization of Information Technology, and Internal Control Systems on Fund Accountability. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(3),
- Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(1).
- Sapartiningih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 21, 544–562.
- SuaraNTB. (2021, May 26). Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Sejumlah Mantan Kades Dan Perangkat Desa Di Lobar Dilimpahkan Ke Jaksa. *Www.Suarantb.Com*.

- Suhaedi, W., Astuti, B. R. D., Inapty, B. A., & Hudaya, R. (2022). Akuntabilitas Fiskal Vs Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 88–103.
- Syafaruddin, A. R. A., Kamase, H. J., & Mursalim. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 9–16.
- Yuda, R. H. (2023). *Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa* [Universitas Jambi].
- Zulaikah, A., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(3).